



**KEPALA DESA GEMPOLREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DESA GEMPOLREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLREJO ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang – undang nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 208, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10);

27. Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);
30. Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 57);
32. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);
33. Peraturan Desa Gempolrejo No 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (lembaran Desa Gempolrejo Tahun 2021 Nomor 5);
34. Peraturan Desa Gempolrejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolrejo Tahun 2020 - 2025 (lembaran Desa Gempolrejo Tahun 2019 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Gempolrejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gempolrejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Gempolrejo Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan : Keputusan Camat Tunjungan Nomor : 142/10/2023 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gempolrejo Nomor 142/ 14 /2023 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLREJO
Dan
KEPALA DESA GEMPOLREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMPOLREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.692.910.800,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.687.910.800,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(9.104.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.104.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>9.104.000,00</u>
Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempolrejo

Ditetapkan di Gempolrejo

Pada Tanggal 15 Januari 2023



Diundangkan di Gempolrejo

pada tanggal 15 Januari 2023

SEKRETARIS DESA GEMPOLREJO,

EPY VITA LISTIANA

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMPOLREJO KECAMATAN TUNJUNGAN
KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	15.000.000	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	-	
4.1.2	Hasil Aset Desa	15.000.000	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong		
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		
4.2	Pendapatan Transfer	2.663.806.800	
4.2.1	Dana Desa	41.864.000	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	23.142.800	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	548.800.000	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	800.000.000	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	350.000.000	
4.3	Pendapatan Lain-lain		
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		
4.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa		
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga		
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya		
4.3.6	Bunga Bank		
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	14.104.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.692.910.800	
5	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000	ADD
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.156.240	ADD
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.102.400	ADD
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65.478.560	ADD, BHPR,PAD,DD(3%) SILPA
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000	ADD
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000	ADD
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.529.600	ADD
1.1.90	Penyediaan Penerimaan Lainnya Yang Sah Kepala Desa/Perangkat Desa (dari PAD dan Bantuan Keuangan Lainnya)		
1.1.99	Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan		
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.437.000	DD
1.3.3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
1.3.4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
1.3.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus rembug desa Non Reguler)		
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
1.4.9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pengisian Perangkat Desa & Pemilihan BPD		
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes		
1.4.90	Penyusunan dan penetapan Stadar Satuan Harga Desa		
1.4.91	Penyelenggaraan kegiatan pengadaan pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemilihan BPD, Pemilihan kelembagaan Desa		
1.4.92	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa		
1.4.93	Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK)		
1.4.94	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD)		
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan		
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
1.5.2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
1.5.3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
1.5.4	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		
1.5.5	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan		
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
1.5.7	Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa		
1.5.90	Pengadaan / pelepasan tanah kas desa		
1.5.91	Kompensasi / ganti rugi lahan terdampak pembangunan		
1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18 600 000	DD
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		
2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		
2.1.4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa		
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal		
2.1.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		
2.1.9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
2.1.90	Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
2 1 91	Dukungan sarana prasarana pendidikan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal bukan milik Desa (dalam bentuk barang)		
2 1 92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
2 2 1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		
2 2 2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	126.762.000	DD
2 2 3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		
2 2 4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.250.000	DD
2 2 5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		
2 2 6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
2 2 7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
2 2 8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
2 2 9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		
2 2 10	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)		
2 2 90	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktid di desa		
2 2 91	Fasilitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik		
2 2 92	Pembangunan dan pengelolaan apotek Desa		
2 2 93	Pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga		
2 2 94	Fasilitas pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus		
2 2 95	Fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin		
2 2 96	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2 2 97	Penyediaan fasilitas kesehatan (mobil siaga / ambulance desa)		
2 2 98	Pemeliharaan fasilitas kesehatan (mobil siaga / ambulance desa)		
2 2 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2 3 1	Pemeliharaan Jalan Desa		
2 3 2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		
2 3 3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
2 3 4	Pemeliharaan Jembatan Desa		
2 3 5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Seelokan/Parit/Drainase dll)	39.745.000	DD
2 3 6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
2 3 7	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		
2 3 8	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
2 3 9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
2 3 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	450.000.000	BANKAB.BANPROV
2 3 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)		
2 3 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	417.104.000	DD.BANKAB.BANPROV
2 3 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	175.000.000	DD
2 3 14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong selokan drainase dll)	250.000.000	DD.BANPROV
2 3 15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)		
2 3 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
2 3 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)		
2 3 18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
2 3 19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		
2 3 20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)		
2 3 90	Pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa)		
2 3 91	Pemeliharaan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
2 3 92	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa)	300 000 000	DD BANKAB BANPROV
2 3 93	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana olah raga / gedung serba guna		
2 3 94	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik desa		
2 3 99	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik desa		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2 4 1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		
2 4 2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
2 4 3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)		
2 4 4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		
2 4 5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)		
2 4 6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
2 4 7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2 4 8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
2 4 9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
2 4 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)		
2 4 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)		
2 4 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)		
2 4 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)		
2 4 14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)		
2 4 15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		
2 4 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)		
2 4 17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)		
2 4 90	Dukungan pelaksanaan program jambanisasi bagi keluarga miskin		
2 4 91	Penyediaan kendaraan pengangkut sampah, gerobak sampah, tong sampah, mesin pengolah sampah		
2 4 92	Pemeliharaan jaringan listrik / penerangan desa		
2 4 93	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik / penerangan desa		
2 4 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2 5 1	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
2 5 2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
2 5 3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)		
2 5 90	Pembangunan lerasing pada daerah rawan longsor		
2 5 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2 6 1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
2 6 2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		
2 6 3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
2 6 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		
2 7 1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa		
2 7 2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa		
2 7 90	Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa		
2 7 99	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
2 8 1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		

Kode Rekening	1	2	3	4	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
282					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Parwisata Milk **)		
283					Pengembangan Parwisata Tingkat Desa		
2899					Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Parwisata		
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
31					Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perindugan Masyarakat		
311					Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
312					Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		
313					Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perindugan Masy Skala Lokal Desa		
314					Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
315					Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
316					Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
317					Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid Hukum & Perindugan Masy		
3190				DD	Dukungan pembinaan keamanan ketertiban ketenteraman dan wilayah (seragam dan operasional linmas)	19 200 000	
3199					Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perindugan Masyarakat		
32					Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
321					Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
322					Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tki Kec/Kab/Kot)		
323					Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)		
324					Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milk Desa		
325					Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana		
3290					Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (BBGRM)		
3291					Dukungan pengelolaan sarana prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan di desa		
3299					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
33					Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
331					Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tki Kec/Kab/Kota		
332					Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		
333					Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
334					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milk Desa		
335					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milk Desa		
336					Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		
3399					Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
34					Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat		
341					Pembinaan Lembaga Adat		
342					Pembinaan LKMD/LPML/PMMD		
343					Pembinaan PKK		
344					Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
3490					Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat		
3491					Pembelian dan dukungan fasilitas kader pembangunan pemberdayaan masyarakat		
3499					Lain-lain Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat		
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
41					Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
411					Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milk Desa		
412					Pemeliharaan Perikanan Pelabuan Sungai/Kecil Milk Desa		
413					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milk Desa		
414					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuan Perikanan Sungai/Kecil Milk Desa		
415					Bantuan Perikanan (Bibid/Pakan/dll)		
416				DD	Bimtek/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	3 000 000	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
4 1 90	1	2	4
4 1 90	Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu		
4 1 91	Pemeliharaan tambatan perahu / tempat pelelangan ikan (TPI)		
4 1 92	Bantuan sarana dan prasarana perkanaan		
4 1 93	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan tambatan perahu		
4 1 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan		
4 2 1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat		
4 2 2	Peningkatan Produksi (alat		
4 2 3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa		
4 2 4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4 2 5	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk		
4 2 6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4 2 90	Peningkatan Produksi tanaman perkebunan (alat produksi dan		
4 2 91	pengolahan perkebunan)		
4 2 91	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai perikanan		
4 2 92	Pembangunan / peningkatan irigasi tersier		
4 2 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perternakan		
4 3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4 3 1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000	BHPR
4 3 2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000	BHPR
4 3 3	Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000	BHPR
4 3 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur		
4 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak		
4 4 1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
4 4 2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		
4 4 3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyangandang		
4 4 90	Disabilitas)		
4 4 90	Fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender		
4 4 91	Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap		
4 4 92	dan anak		
4 4 92	Peningkatan kapasitas kelompok pemertali dan perlindungan		
4 4 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,		
4 5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah		
4 5 1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		
4 5 2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,		
4 5 3	Meningkatkan dan Koperasi		
4 5 3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan		
4 5 99	Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		
4 5 99	Lain-lain Sub Bidang produk unggulan desa / pameran		
4 6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4 6 1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal		
4 6 2	BUMDesa)		
4 6 2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan		
4 6 90	Pembangunan / rehabilitasi kantor BUMDesa / sarana		
4 6 91	Prasarana BUMDesa		
4 6 92	Pelaksanaan audit keuangan BUMDesa, evaluasi		
4 6 92	perencanaan Modal BUMDesa		
4 6 99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4 7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
4 7 1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa		
4 7 2	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		
4 7 3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4
4 7 4	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
4 7 99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
4.8	Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan		
4.8.1	Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	1 200 000	DD
4 8 2	Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin		
4.8.3	Pembentukan Posko Kesejahteraan Sosial (Poskesdes)		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5 1 1	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
5 2.1	Penanganan Keadaan Darurat		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5 3 1	Penanganan Keadaan Mendesak	235 466 000	DD (100%) 25%
	JUMLAH BELANJA	2.687.910.800	
	SURPLUS / DEFISIT	-9.104.000	
6	PEMBIAYAAN		
6 1	Penerimaan Pembiayaan		
6 1 1	SILPA Tahun sebelumnya	14.104 000	
6 1 1 01	Pencairan Dana Cadangan		
6 1 1 02	Hasil Kekayaan Desa Yang di Pisahkan		
	JUMLAH (Rp)	14.104.000	
6 2	Pengeluaran Pembiayaan		
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		
6 2 2 01	Penyertaan Modal Desa	5 000 000	DD
	JUMLAH (Rp)	5.000.000	
	SELISIH PEBIAYAAN	9 104 000	

